



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2025/Periodik - 2024)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN MAROS  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : NENI FATMAH  
2. Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III  
3. NHK : 490335

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.380.000.000

1. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA MAROS, HADIAH Rp. 150.000.000  
2. Tanah Seluas 8915 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000  
3. Tanah Seluas 3500 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000  
4. Tanah Seluas 13511 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000  
5. Tanah Seluas 4787 m2 di KAB / KOTA MAROS, WARISAN Rp. 150.000.000  
6. Tanah Seluas 1236 m2 di KAB / KOTA MAROS, WARISAN Rp. 130.000.000  
7. Tanah dan Bangunan Seluas 1500 m2/39 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI , WARISAN , Rp. 450.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 100.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 83.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 3.649.284

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.566.649.284



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.566.649.284

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.